



# Buletin Parlementaria

## Awasi Perusahaan yang Terapkan UMK Rendah



3 Tinjau Galeri  
Batik Bersejarah  
di Banyumas,  
Puan Dorong  
Regenerasi  
Pembatik



5 Bukan Hasil  
Final, KPU  
Harus Selesaikan  
Kegaduhan  
Akibat Polemik  
Sirekap

Nomor 1282/IV/II/2024 • Februari 2024



9 772614 339005



# Awasi Perusahaan yang Terapkan UMK Rendah

**T**im Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Herman Khaeron menyambangi PT Longrich Indonesia di Cirebon Jawa Barat. Kunjungan Komisi VI DPR tersebut adalah untuk menindaklanjuti atas banyaknya pengaduan masyarakat. Beberapa kasus yang mencuat diantaranya yaitu adanya permintaan uang masuk sebagai karyawan, catering yang tidak bermutu, serta tingkat kesejahteraan yang rendah.

"Kami melakukan pengawasan atas realisasi investasi yang selama ini tentu BKPM beserta seluruh jajarannya sudah bekerja keras untuk bisa merealisasikan target-target investasi. Tadi temuannya bahwa ada UMK (Upah Minimum Kab/Kota) yang terlalu rendah, suasana pabrik yang perlu diperbaiki, dan juga makan siang yang kurang berkualitas. Ini fakta yang harus kita lakukan terus-menerus, supaya investasi betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan," tutur Herman di Cirebon Jawa Barat, Senin (19/2).

Dalam rapat-rapat dengan Kementerian Investasi/BKPM, lanjut Herman, yang dibicarakan bukan hanya soal kuantitas atau seberapa besar investasi itu masuk dan mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana investasi ini bisa menjadi sebuah investasi inklusif, yang terbuka dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dan secara kualitas tentu memberikan daya dukung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Investasi yang bukan hanya kuantitas tapi memiliki kualitas, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik tingkat kesejahteraan, perbaikan lingkungan



Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Herman Khaeron menyambangi PT Longrich Indonesia di Cirebon Jawa Barat. Senin (19/2/2024).

hidup, kemudian meningkatkan ruang-ruang maupun peluang-peluang baru dalam usaha masyarakat. Ini penting," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dikatakannya, Komisi VI DPR mendukung terhadap peningkatan investasi dan mendorong pertumbuhan investasi agar dapat lebih baik lagi kedepannya.

Masalah lain yang juga menjadi sorotan Komisi VI atas keberadaan PT Long Rich Indonesia di Cirebon adalah posisi lokasi pabriknya yang tidak berada didalam kawasan industri sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. "Saya termasuk dari awal yang mempertanyakan masalah itu. Apakah kawasan ini sah menjadi kawasan industri. Karena memang hanya dua kawasan yang diperbolehkan, yakni dalam

kawasan industri atau dalam kawasan peruntukan industri. Kalau tidak masuk dalam dua kriteria kawasan itu, maka seperti apa kawasan ini," tukasnya.

Lagi pula kalau kita perhatikan, tambah Herman, dengan menyusutnya kawasan pangan produktif atau kawasan hijau di sini, dimana dulunya disini merupakan kawasan tanaman bawang dan tebu, lalu menjadi kawasan pabrik, tentu biaya hidup masyarakatnya juga akan semakin meningkat.

"Nah inilah yang harus dipertimbangkan betul, bahwa bukan hanya untuk jangka pendek ini menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya, tetapi juga secara jangka panjang bagaimana dampak terhadap masyarakat di sekitar, " pungkasnya. **dep/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Puan Dorong Regenerasi Pembatik



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat meninjau galeri batik Hadi Priyanto di Banyumas, Jawa Tengah.

**K**etua DPR RI Puan Maharani bersama sejumlah Anggota DPR meninjau galeri batik Hadi Priyanto di Banyumas, Jawa Tengah. Batik Hadi Priyanto sendiri merupakan salah satu batik yang punya banyak sejarah karena sudah berdiri sejak tahun 1957.

"Batik adalah ikon Indonesia, sudah menjadi warisan budaya tak benda UNESCO," ujar Puan saat meninjau proses pembatikan yang dilakukan para pembatik di Rumah Batik Hadi Priyanto, Banyumas beberapa saat lalu.

Politisi PDI-Perjuangan itu terkesan dengan Rumah Batik Hadi Priyanto yang memiliki mesin pintal untuk membuat bahan (kain) batik

dengan 3.600 benang yang saat ini dikelola oleh keturunan ke-3 dan memiliki 30 pegawai.

"Keunikan batik tiap daerah perlu diangkat reputasinya secara setara, agar semuanya bisa berbarengan terkenalnya," tegas Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) itu.

Lebih lanjut, Puan pun mendorong agar ada regenerasi untuk para pembatik. Dengan begitu, budaya lama Indonesia tidak akan terkikis zaman. "Perlu diperhatikan regenerasi dari para pengrajin batik agar karya budaya ini dapat terus dilestarikan," tutur Puan. [pun@rdn](mailto:pun@rdn)



## PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

### WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

### PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

### PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

### WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

### REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

### SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

### ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbara, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonmaricha Firista Dysie, Balggys Maesynthia, Anju Alfionco Sitompul, Zulfikar Mubien

### FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

### ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indrianti Siahaan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos. M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Risa

### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Peringati HPN 2024, Rudianto Tjen Ajak Insan Pers Kawal Pemilu yang Jurdil dan Luber

**A**nggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen mengajak segenap insan pers untuk menciptakan proses Pemilu dengan baik. Semua hal yang dilakukan oleh media, tambahannya, semata-mata adalah untuk menjaga, agar pelaksanaan Pemilu Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).

Hal itu disampaikan Rudi dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024, khususnya menjelang ajang kontestasi akbar 14 Februari 2024 mendatang.

"Selamat Hari Pers Nasional 2023, kita harapkan teman-teman insan pers bisa hadir untuk terus menciptakan demokrasi yang bermartabat di republik ini," kata Rudi dalam keterangan tertulis yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Minggu (11/2).

Rudi menambahkan, sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

"Karena informasi ini sifatnya dinamis. Maka perlu kerja-kerja pers yang informatif, edukatif, dan inspiratif sebagai rujukan terpercaya bagi masyarakat," ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain meningkatkan literasi masyarakat, Rudi menilai, insan pers sangat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

”

**KARENA INFORMASI INI SIFATNYA DINAMIS. MAKA PERLU KERJA-KERJA PERS YANG INFORMATIF, EDUKATIF, DAN INSPIRATIF SEBAGAI RUJUKAN TERPERCAYA BAGI MASYARAKAT.**

Karya rekan-rekan insan pers, jelasnya, adalah referensi paling awal bagi pengambilan kebijakan. Laporan pers yang cepat dan akurat terkait permasalahan publik yang ditemukan sangat membantu pemerintah untuk segera tahu persoalan dan keputusan apa yang mesti diambil. Karena itu pers juga pada dasarnya mitra strategis pemerintah," kata Rudi.

"Semoga insan pers tanah air khususnya di Bangka Belitung semakin jaya, dan dapat menjalankan tugasnya secara profesional bertanggung jawab dan bermartabat," tutupnya. **hal/rdn**

Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen.



FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



# KPU Harus Selesaikan Kegaduhan Akibat Polemik Sirekap

**A**nggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait potensi kegaduhan berkenaan dengan publikasi hasil pemilu melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. Amin meminta KPU mengevaluasi Sirekap yang dinilai tidak akurat dan justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Sejak awal Komisi II sudah memberikan peringatan. Saat

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU saya sudah sampaikan persiapan dengan baik agar tidak gaduh. Sirekap pakai sistem teknologi, jika tidak ada proteksi yang kuat bisa terjadi kerawanan," ungkap Aminurokhman, dalam keterangannya yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Selasa (20/2).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh

KPU. Apalagi, tambah Amin, sapaan Aminurokhman, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa Sirekap hanya alat bantu yang bisa digunakan untuk memantau perolehan hasil penghitungan suara.

"Ketika publik banyak belum memahami Sirekap hanya jadi alat bantu, lalu sistemnya justru banyak perbedaan dengan hasil formulir C1 maka terjadi kegaduhan. Penghitungan resmi itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional, berjenjang," tegas Amin.

Legislator Dapil Jawa Timur II itu menyebut akan ada evaluasi dari Komisi II terkait penggunaan Sirekap. Menurutnya, Sirekap bisa saja digunakan hanya untuk internal KPU.

"Kalau itu tetap dipublikasi dan jadi konsumsi masyarakat maka sistemnya harus diperkuat. Jangan jadi seperti ini, gaduh, dianggap sebagai hasil final," tegas Amin.

Terkait anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap, Amin mengatakan Komisi II tidak membahas anggaran hingga satuan tiga atau dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program dengan KPU.

"Kami tidak dalam pembahasan hingga satuan tiga. Ketika anggaran untuk pelaksanaan pemilu dianggap sudah bisa dijalankan, maka kami tekankan untuk bisa dimaksimalkan dalam prosesnya," pungkas Amin.



Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman.

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: EOT/PDT

we/rdn

# Proses Penghitungan Suara, Jangan Sampai Kekhawatiran Publik

**A**nggota Komisi II DPR RI Guspardy Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.

"Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugian apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional," kata Guspardy saat dihubungi **Parlementaria**, Senin (19/2).

Selain itu, Guspardy juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. "Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan," sambung Guspardy.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai

arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai

”

**SAYA MEMINTA KEPADA PENYELENGGARA PEMILU, YAKNI KPU AGAR BEKERJA SECARA PROFESIONAL TERKAIT PENGHITUNGAN, BAGAIMANA AGAR PROSES PENGHITUNGAN INI TIDAK MENIMBULKAN KERUGIAN APALAGI ADA SEMACAM PANDANGAN BAHWA KPU TIDAK BEKERJA SECARA PROFESIONAL.**

Anggota Komisi II DPR RI  
Guspardi Gaus.

kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardy dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

"Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap," pungkasnya. **we/aha**

FOTO: AFR/PDT



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

**A**nggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

"KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap

”

**JIKA SIREKAP DILAKUKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PERHITUNGAN SECARA MANUAL HARUSLAH TETAP BERLANJUT. DIKARENAKAN, HAL ITU MERUPAKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG PEMILU, YANG MENERANGKAN BAHWA DASAR PERHITUNGAN PEMILU ADALAH PERHITUNGAN MANUAL.**

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.



diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual," kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara," tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. [we/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: IST/PTT

# Tiap Polda Harus Bentuk 'Call Center' Bagi KPPS

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong setiap

Kepolisian Daerah (Polda) dapat membentuk *call center* dalam rangka membantu KPPS ketika membutuhkan pertolongan medis. Layanan kesehatan itu harus selalu aktif sepanjang hari sehingga menjamin penyelenggara Pemilu.

"Kapolda di setiap daerah wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan jajaran di tingkat polres hingga polsek, responsif terhadap situasi di lapangan," ungkap Sahroni dalam keterangan tertulis yang dikutip **Parlementaria**, di Jakarta, Sabtu (17/2).

"Pokoknya, Polri harus lakukan segala cara untuk bantu jamin kesehatan dan keselamatan para petugas," ungkap legislator

”

**MESKIPUN KPU SUDAH BERUSAHA MELAKUKAN SCREENING KESEHATAN SEMAKSIMAL MUNGKIN, NAMUN FAKTANYA MASIH BANYAK PETUGAS KPPS YANG SAKIT MAUPUN MENINGGAL KARENA TUGAS MEREKA SANGAT BERAT.**

NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu.

Sahroni juga menyampaikan seluruh jajaran Polri harus memberikan perlindungan maksimal kepada petugas KPPS. Menurut dia, tidak ada kontestasi elektoral yang sebanding dengan ratusan nyawa manusia.

"Tidak ada kontestasi yang sebanding dengan hilangnya nyawa manusia. Karenanya, saya minta Polri ambil peran semaksimal mungkin. Lakukan yang terbaik," tegas Sahroni.

Selain itu, Sahroni juga menilai pendampingan kesehatan petugas KPPS selama bertugas dinilai sebagai langkah pencegahan yang sangat baik. Pasalnya, pekerjaan yang diemban para petugas KPPS dinilai tak ringan.

"Meskipun KPU sudah berusaha melakukan *screening* kesehatan semaksimal mungkin, namun faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat, katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim Kombes Erwin Zainul Hakim menyampaikan bahwa pihaknya memberikan pendampingan kesehatan kepada petugas Pemilu 2024. Pendampingan dilakukan oleh 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Selain petugas, Polda Jatim memiliki aplikasi Pengamanan Kesehatan Pemilu Jawa Timur. Aplikasi tersebut memiliki fitur panic button jika terjadi kedaruratan medis. "Ini langkah dan cara tepat yang harus diikuti oleh polda-polda lain di Tanah Air," ujar Sahroni. **rdn**

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.



FOTO: JKA/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Impor Beras di Masa Tidak Panen, Atasi Kelangkaan Tanpa Rugikan Petani

**B**eras premium mengalami kelangkaan di sejumlah toko ritel modern. Bahkan pedagang pasar ikut menjerit lantaran harganya terus meroket. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.

Jika itu disebabkan El Nino, maka menurut Sarmuji persoalannya bakal lebih rumit karena dampak yang dirasakan akan mempengaruhi masa tanam dan juga masa panen. Namun, jika produksi beras terbukti kurang, maka jalan satu-satunya ialah mengimpor beras.

Meski demikian, Sarmuji mengingatkan untuk tidak merugikan petani lokal, impor jangan dilakukan pada masa panen.

"Saya menyarankan agar kelangkaan ini bisa teratasi

satu-satunya jalan harus impor, kita tidak mungkin membiarkan masyarakat mengalami kekurangan ketersediaan pangan yang menjadi bahan pokok utama. Bisa saja diatur impor beras pada saat tidak musim panen jadi tidak merugikan petani," ujarnya saat Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Jawa Timur, Senin (19/2).

Lanjut Politisi Partai Golkar ini, pemerintah harus fleksibel terhadap penyesuaian harga beras di pasaran. Ia menghimbau jangan sampai petani yang berproduksi karena dipatok dengan harga eceran tinggi malah menahan angka produksi. "Situasi tersebut akan berdampak adanya penimbunan dalam gudang karena tidak adanya kejelasan, kenaikan harga akan terjadi karena langkanya stok beras," jelasnya.

Di sisi lain, Sarmuji mengatakan sesuai apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi bahwa banjirir pasar-pasar yang ada dengan

produk-produk pangan.

"Dengan demikian tiap pekan atau bulan harus ada operasi pasar yang memantau akan ketersediaan pangan di setiap pasar-pasar. Sehingga kelangkaan pangan bisa teratasi dengan sistem seperti itu," katanya.

Adapun menurut Bulog, realisasi impor beras tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan stabilitas harga mencapai 507.000 ton. Perusahaan negara itu mengakui bahwa saat ini tidak dapat menyerap beras lokal karena harga gabah sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Diketahui, Bulog mendapatkan penugasan impor sebanyak 2,5 juta ton pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 500.000 ton merupakan penugasan lanjutan dari tahun 2023 dan 2 juta sisanya merupakan penugasan impor khusus tahu 2024.

— rni/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Jawa Timur, Senin (19/2/2024).

FOTO: ISB/PDI

# Produsen Alas Kaki Cirebon Harus Berdampak Sosial Bagi Masyarakat

**T**erkait banyaknya aduan dan keluhan dari warga masyarakat terhadap PT Long Rich Indonesia, Anggota Komisi VI DPR

RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong agar perusahaan alas kaki itu bisa melakukan pembenahan dan perbaikan. Apalagi aduan itu membeberkan kekurangan penerapan sistem manajemen dan operasional dari perusahaannya.

"PT Long Rich Indonesia harus bisa berbenah lagi dan bisa memberikan dampak sosial yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. PT Long Rich Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh adanya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia dan kita lihat tadi cukup besar mereka berinvestasi di Cirebon yakni sekitar Rp2,1 triliun," ucap Husein di sela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/2).

Ia mengatakan, dengan keberadaan PT Long Rich Indonesia di Cirebon, telah membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap sampai 20.000 tenaga kerja. "Ini merupakan hal yang positif bagi

”

**JADI BUKAN HANYA SOAL PEKERJAAN, TETAPI JUGA DAMPAK SOSIAL YANG LEBIH LUAS PADA MASYARAKAT YANG MEMANG BELUM MENDAPATKAN PEKERJAAN DARI DIBUKANYA PERUSAHAAN ATAU PABRIK DI TEMPAT TERSEBUT.**

Indonesia. Itu hanya salah satu contoh kecil, mungkin ada juga perusahaan-perusahaan asing dan besar lainnya yang ingin berinvestasi ke Indonesia," ujarnya.

Terkait soal perizinan, Husein menyampaikan hal itu masih menjadi salah satu kendala yang harus terus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya Kementerian investasi BKPM. Meski demikian diakuiinya bahwa memang tidaklah mudah untuk menarik investasi dari luar, namun itu menjadi salah satu pekerjaan utama.

Terkait adanya temuan-temuan di lapangan, ia menyatakan bahwa hal tersebut juga merupakan suatu kendala yang harus dilakukan perbaikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, bukan hanya perusahaan asing tetapi juga perusahaan lokal di Indonesia.

"Semua perusahaan baik asing maupun lokal harus bisa memberikan dampak yang lebih positif pada masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat yang memang belum mendapatkan pekerjaan dari dibukanya perusahaan atau pabrik di tempat tersebut. Hal itu perlu perhatian khusus juga," tandasnya.

Ia menambahkan, Komisi VI akan terus memantau dan juga monitoring kementerian terkait untuk bisa betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. "Ini menjadi PR yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa langsung beres dengan sekali-dua kali pekerjaan saja," tutup Husein. **dep/aha**



Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).



# Pemerintah Harus Dukung Pengembangan Riset Tanpa Hentikan Program Beasiswa

**A**nggota Komisi VII DPR RI Ribka Tjiptaning menegaskan pemerintah harus mendukung penuh pengembangan riset lewat peningkatan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tanpa harus mengurangi anggaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Riset menurut saya sangat penting bagi sebuah negara. Karena lewat Riset dari hal yang tidak jelas, menjadi jelas. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak hanya dalam satu bidang kehidupan, tapi di segala bidang. Dari tumbuhan, sampai teknologi. Semua itu menurut saya sebuah investasi," ungkap Ribka saat Komisi VII DPR RI meninjau Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan perkawinan anggrek dengan bunga lain yang dilakukan

oleh peneliti dari BRIN. Dari perkawinan tersebut menghasilkan bunga jenis lain yang daunnya seperti daun anggrek pada umumnya, namun bunganya kecil-kecil seperti bunga melati. Tidak hanya itu, ia juga melihat tumbuhan rerumputan yang ternyata bisa hidup di tambang.

"Di Dapil saya sendiri, berbagai pelatihan sempat diajarkan oleh BRIN kepada masyarakat di Dapil

”

**RISET MENURUT SAYA SANGAT PENTING BAGI SEBUAH NEGARA. KARENA LEWAT RISET DARI HAL YANG TIDAK JELAS, MENJADI JELAS.**

saya. Seperti beberapa waktu lalu membuat bakso dari rumput laut, dan berbagai jenis pelatihan lainnya yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu saya cukup mengapresiasi dan berterima kasih pada BRIN," paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Ribka, pemerintah tentu harus terus mendukung penuh pengembangan riset anak bangsa. Komisi VII DPR pun sepakat akan terus mendukung BRIN, salah satunya lewat dukungan peningkatan anggaran berbagai program BRIN.

Meski demikian, pihaknya tidak sependapat jika peningkatan anggaran BRIN tersebut diambil dengan menghentikan program beasiswa LPDP bagi anak bangsa. Pasalnya kedua hal tersebut merupakan program yang sama-sama penting. Beasiswa LPDP sangat dibutuhkan untuk mendukung dan membantu anak bangsa yang memiliki potensi dan kemampuan, namun tidak memiliki dana yang cukup.

Terkait hal tersebut, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang mendampingi Komisi VII DPR RI meninjau Kebun Raya Bogor yang notabene di bawah pengelolaan BRIN ini mengungkapkan bahwa program Beasiswa LPDP tetap akan terus berjalan alias tidak dihentikan. Namun untuk ke depan, anggaran untuk program tersebut dialihkan untuk program lain. Karena, dana abadi untuk program Beasiswa tersebut dapat dikatakan masih cukup banyak. ayu/aha



FOTO: AYU/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI Ribka Tjiptaning foto bersama di sela-sela Komisi VII DPR RI meninjau Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

# PLN Diimbau Tingkatkan Penggunaan Biomassa

**P**ada kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jateng, Komisi VII DPR RI melihat dari dekat progres pemanfaatan biomassa ini. PT. PLN diimbau terus memanfaatkan penggunaan biomassa, menggantikan batu bara atau yang populer disebut co-firing untuk memproduksi energi listrik.

Bertemu dengan direksi PLN Adipala, Komisi VII mendapatkan fakta bahwa sudah 2-3 persen

BUMN di Cilacap itu menggunakan biomassa. Sementara sudah beberapa PLN di Indonesia yang 100

”

**YANG HARUS KITA PIKIRKAN, KEBERLANJUTANNYA. ITU MASALAHNYA, KARENA STOK BERUBAH TERUS. LALU APAKAH NANTI ADA PELUANG UNTUK EKSPOR.**

persen menggunakan biomassa.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, usai pertemuan, Rabu (7/2), menyampaikan optimismenya, PLN Adipala ini bisa terus meningkatkan penggunaan biomassa. "Kalau lihat laporan mereka tadi, saya kira kita optimis. Khusus di Adipala ini sudah 2-3 persen dan itu progres yang bagus. Di Indonesia ada 4-5 (PLTU) yang sudah 100 persen menggunakan biomassa," ungkapnya.

Yang perlu dipikirkan, lanjut Politisi PKB ini, keberlanjutan stok biomassa untuk diolah menjadi sumber energi. Materi biomassa yang selama ini digunakan adalah bubuk gergaji, cangkang sawit, limbah racik uang kertas (LRUK), dan pelet kayu. Semua stok bahan baku itu selalu berubah, tergantung ketersediaannya. Inilah, katanya, yang harus dipikirkan.

Sementara LRUK dipasok dari Bank Indonesia. Uang-uang kertas yang sobek dan lusuh yang tidak layak pakai, dikirim ke PLN untuk diolah menjadi energi. Dari sekian banyak bahan baku penghasil energi, LRUK merupakan sumber paling tinggi kalori untuk energi. PLN mendapat pasokan dari BI hingga 15 ton.

"Yang harus kita pikirkan, keberlanjutannya. Itu masalahnya, karena stok berubah terus. Lalu apakah nanti ada peluang untuk ekspor," tutur Karding. Semua bahan baku biomassa ini merupakan sumber energi baru dan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pada 2025, PLN Adipala menargetkan penggunaan biomassa hingga 5 persen.

mh/aha

FOTO: MHI/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja ke PT. PLN Adipala, Cilacap, Jateng.

# Pastikan Keandalan PLN Jelang Pemilu, Komisi VII: Harus Melek, Gak Boleh Kedip

**A**nggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengapresiasi keandalan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) jelang Pemilihan Umum (Pemilu). PLN memastikan pasokan listrik aman saat masa pencoblosan dan perhitungan suara dalam Pemilu 2024.

"Direksi PLN telah

”

**OLEH KARENA ITU PLN KITA MINTA AGAR BETUL-BETUL JAGA 24 JAM DI PEMILU JANGAN SAMPAI PAS PENGHITUNGAN SUARA, MATI. LALU DATANYA BERUBAH. KITA TIDAK BISA MENYALAHKAN ORANG YANG CURIGA. AGAR BISA BERPIHAK KEPADA SEMUA MASYARAKAT. JANGAN SAMPAI ADA SUARA YANG HILANG ATAU PINDAH,**

menginstruksikan kepada jajarannya sampai ke bawah, yaitu tentang keandalan PLN di masa pemilu, jadi harus istilahnya melek tak boleh berkedip," ungkap Hisjam kepada **Parlementaria** usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (7/2).

Ia menyampaikan jangan sampai dengan matinya aliran listrik pada saat pemilu, menimbulkan asumsi-asumsi negatif masyarakat terhadap netralitas PLN. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat hal tersebut pernah terjadi pada Pemilu tahun 2019 lalu.

"Jangan sampai melek terus tapi pada saat pemungutan atau perhitungan suara kok mati. Sehingga menimbulkan curiga. Padahal tidak ada apa-apa. Oleh karena itu PLN kita minta agar betul-betul jaga 24 jam di Pemilu jangan sampai pas penghitungan suara, mati. Lalu datanya berubah. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang curiga. Agar bisa berpihak kepada semua masyarakat. Jangan sampai ada suara yang hilang atau pindah," jelas Hisjam.

Ridwan Hisjam juga mengingatkan agar keandalan PLN dalam menjaga aliran dan pasokan listrik betul-betul terjaga tidak hanya saat agenda besar seperti Pemilu saja. Namun juga di setiap harinya.

"Tetapi ada sorotan dari para anggota (dewan). Melek tidak boleh kedip jangan sampai pemilu saja, harus sampai Desember. PLN ini sudah harus melek terus," pungkasnya. **syn/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa, (7/2/2024).

FOTO: SHN/PDT

# Salurkan 20 Ton Beras, Komisi VIII Harap Sulsel Lebih Berdaya dan Sejahtera

**T**im Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Makassar, Sulawesi Tengah. Kunker tersebut dalam rangka menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa *buffer stock* logistik senilai Rp1.590.960.000 yang terdiri dari permakanan, peralatan evakuasi, sandang, perlengkapan keluarga dan beras.

Buffer Stock beras sendiri berjumlah 20 ton. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dan diterima oleh Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal.

"Tentu harapan kami bahwa seluruh atensi semua bantuan ini bisa betul-betul membantu bagi warga yang kurang mampu dan layak

menerima dengan harapan dengan bantuan ini mereka satu waktu bisa lebih berdaya tentunya diharapkan bisa lebih sejahtera dengan seluruh bantuan yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Sosial," ujar Ketua Komisi VIII Abdul Kahfi di Makassar, Sulawesi Selatan (7/2).

”

**UNTUK ITU JIKA SELURUH PROGRAM TERSEBUT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, DILAKUKAN DENGAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR YANG BAIK...**

Selain beras terdapat pula bantuan seperti Bantuan Program Keluarga Harapan untuk 333.557 KPM senilai Rp175.365.394.590, Bantuan Program Sembako Tahap I untuk 605.802 KPM senilai Rp121.160.400.000 dan alat bantu disabilitas berupa motor roda tiga.

Kemudian Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) untuk se-Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp364.612.159, Bantuan PENA Kemensos untuk 2 orang senilai Rp10.000.000 dan Bantuan Sarana Pasca Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PENA untuk 30 orang di kota Makassar senilai Rp66.301.076.

Bantuan-bantuan tersebut merupakan bentuk bantuan atensi pemberdayaan ekonomi melalui wirausaha UMK. Dengan adanya komitmen bersama, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat wewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan atau keluarga kurang mampu di Provinsi Sulawesi Selatan agar lebih sejahtera.

"Untuk itu jika seluruh program tersebut dilaksanakan dengan baik, dilakukan dengan koordinasi lintas sektor yang baik, maka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Memulihkan fungsi sosialnya dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial," tandas Legislator dapil Sulawesi Selatan I itu. [gal/rdn](https://www.gal/rdn)



FOTO: GAL/RDI

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial dalam rangka kunjungan kerja reses di Makassar, Sulawesi Selatan (7/2/2024).



# Kurangi Angka Stunting dan Kematian Ibu, Komisi VIII Komitmen Selesaikan RUU KIA

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan Komisi VIII

berkomitmen mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). RUU tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan akses serta kecepatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.

"Pembahasan UU KIA menjadi momentum penting untuk menanggapi kasus meningkatnya angka kematian ibu di Jabar karena akses kesehatan yang kurang memadai," katanya kepada Parlemen usai memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/2).

Di akhir masa jabatan Anggota DPR Periode 2019-2024, Diah menegaskan berkomitmen untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah bersama pemerintah guna mengatasi tantangan ini. "Kita masih ada waktu 6 bulan (hingga Oktober 2024), pembahasan RUU ini sebenarnya sudah selesai namun ada beberapa hal yang masih perlu untuk diharmonisasi," ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Melalui RUU KIA, langkah-langkah konkret diharapkan akan memperkuat sistem kesehatan yang ada, memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, dan untuk memperkuat kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. "Kami menggarisbawahi pentingnya anggaran kesehatan

yang memadai untuk mendukung program-program peningkatan akses kesehatan," jelasnya.

”

**DENGAN ADANYA PEMBAHASAN INI, DPR MEMBERIKAN SINYAL KUAT BAHWA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI IBU DAN ANAK MENJADI PRIORITAS NASIONAL YANG HARUS DIKEJAR BERSAMA.**

Selain itu, angka stunting juga menjadi fokus utama, di mana kebijakan dari adanya RUU KIA ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mengurangi angka stunting di Jabar yang masih tinggi.

"Dengan adanya pembahasan ini, DPR memberikan sinyal kuat bahwa perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan bagi ibu dan anak menjadi prioritas nasional yang harus dikejar bersama," tegasnya. ➡ [rnm/rdn](#)



FOTO: RIA/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sturman: Negara Maritim Rakyatnya Sejahtera Dari Hasil Laut

**A**nggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Kelautan DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa suatu negara disebut sebagai negara maritim apabila negara tersebut mampu

”

**KITA BERHARAP KEWENANGAN PERIJINAN, BUDIDAYA PERIKANAN TIDAK DIKUASAI OLEH PUSAT. TAPI ADA PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE PROVINSI SEHINGGA KAMI BISA MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG-JAWABNYA.**

mensejahterakan rakyatnya dari hasil kekayaan laut.

"Masalah kelautan era Orde Baru kurang mendapat perhatian, sehingga sekarang masalahnya menjadi semakin rumit dengan banyaknya kementerian yang merasa memiliki kewenangan masing-masing. Kami datang untuk mendengarkan langsung masalah apa saja agar bisa diakomodir dalam perubahan undang-undang kelautan yang sedang disusun," kata Sturman saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ke

Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/1).

Politisi PDI-Perjuangan yang juga purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Laut ini menambahkan harapannya melalui RUU Kelautan yang sedang digodok agar bagaimana laut itu dipenuhi kapal-kapal kita dengan aturan yang jelas. Sebab negara maritim adalah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya dari hasil laut.

"Metode Omnibus Law seharusnya dipakai dalam menyusun UU ini agar menyederhanakan masalah kelautan kita dan banyaknya instansi yang berwenang sehingga menyulitkan koordinasi," imbuh Legislator Dapil Kepulauan Riau ini.

Dilain pihak, Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Sumut, Hamdan Sukri Siregar menjelaskan bahwa pihaknya selama ini lebih fokus pada pengawasan perikanan radius 12 mil, karena selebihnya dikuasai oleh pusat.

"Kita berharap kewenangan perijinan, budidaya perikanan tidak dikuasai oleh pusat. Tapi ada pembagian kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi sehingga kami bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya," urai Hamdan.

"Di laut terlalu banyak kewenangan yang campur aduk, ada kementerian perhubungan, ada kementerian kelautan dan maritim, ada kementerian pariwisata, ada kementerian ATR BPN soal kewenangan di pantai," pungkasnya.

 oji/aha

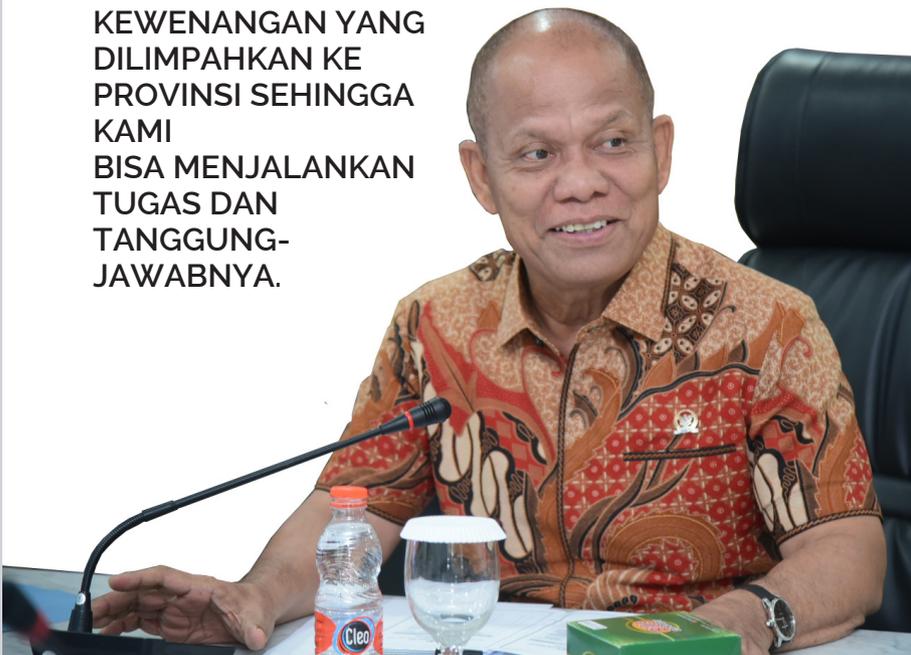


FOTO: OJI/PDI

Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Kelautan DPR RI, Sturman Panjaitan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Panitia Khusus RUU Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (29/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Muatan Materi RUU Kelautan Harus Dapat Tutup Celah Sindikat Narkoba

**A**nggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kelautan (Pansus RUU Kelautan) Siti Nurizka Puteri Jaya menegaskan revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan harus memperkecil celah oknum untuk melakukan kejahatan di kawasan laut milik Indonesia. Satu di antaranya adalah sindikat narkoba.

Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima, 80 persen peredaran narkoba ke Indonesia melalui jalur laut. Menurutnya, pengawasan dan pengamanan yang terbatas mengakibatkan kasus narkoba menjadi sulit dibendung.

Sebab itu, ia sepakat sektor keamanan laut perlu dikaji secara serius dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat. Persoalan keamanan laut tersebut disampaikan Nurizka dalam agenda kunjungan kerja Pansus RUU Kelautan yang dihadiri Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan beserta para jajaran pejabat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/1).

"Pansus (RUU Kelautan) ini, saya ingin mengkritik dari segi keamanan laut dari marabahaya peredaran narkoba di laut. Undang-Undang Kelautan perlu direvisi supaya ada penegakan hukum yang jelas demi terlaksananya kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan kelautan bangsa dengan kuat," ucap Anggota Komisi III DPR RI ini. Politisi Fraksi Partai Gerindra

”

**TENTUNYA KITA HARUS MENCIPTAKAN PERATURAN YANG MEMILIKI STRATEGI YANG TEPAT UNTUK KEBIJAKAN INI. TENTU, KITA PERLU PERTIMBANGKAN TEKNISNYA AGAR ATURAN-ATURAN YANG DIBUAT BISA EFEKTIF DITERAPKAN DENGAN REALITAS YANG TERJADI.**

itu berharap RUU Kelautan bisa mengakomodasi kewenangan dari Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI AL, dan Badan Keamanan Laut agar dapat bersinergi menjaga lintas perairan laut secara optimal. Sinergi ini, nilainya, jadi krusial karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan garis pantai yang luas.

"Tentunya kita harus menciptakan peraturan yang memiliki strategi yang tepat untuk kebijakan ini. Tentu, kita perlu pertimbangkan teknisnya agar aturan-aturan yang dibuat bisa efektif diterapkan dengan realitas yang terjadi," tutupnya. **ts/rdn**



FOTO: TS/PDT

**Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kelautan (Pansus RUU Kelautan) Siti Nurizka Puteri Jaya dalam agenda kunjungan kerja Pansus RUU Kelautan yang dihadiri Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan beserta para jajaran pejabat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/1/2024).**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Bisa Dapat Soft Skill Hingga Ilmu Spesial Ke-DPR-an

**P**rogram Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI Batch ke-4 yang dinanti-nanti segenap mahasiswa se-Indonesia akhirnya kembali digelar. Sebagaimana diketahui, MDRR merupakan sebuah program magang kerja yang tidak hanya menawarkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu keterampilan dan pengetahuan teknis terkait dunia kerja, namun juga menawarkan kesempatan bagi tiap peserta untuk mendapatkan soft skill.

Diantaranya seperti memperkuat integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil dan perekat bangsa. "Kelima *soft skill* ini akan sangat membantu adik-adik mahasiswa nanti saat benar-benar terjun ke dunia kerja sesungguhnya," pesan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat pidato pembukaan Program MDRR DPR RI Batch ke-4 yang digelar daring dari Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

Lebih istimewanya, MDRR DPR juga memberikan pengalaman spesial yang tidak akan didapatkan di tempat lain bagi setiap pesertanya yaitu ilmu dan pengetahuan tentang ke-DPR-an. "Adik-adik akan diajak untuk merasakan secara langsung aktivitas di DPR, dapat melihat dan memahami secara lebih komprehensif bagaimana kerja-kerja politik yang dilaksanakan oleh seluruh Anggota DPR dalam mempresentasikan fungsinya yaitu wakil rakyat," terang Indra.

Indra juga berkesempatan menceritakan kisah Thariq bin Ziyad yang dikenal sebagai Legenda Panglima Perang tentang keberhasilan penaklukkan Andalusia.

Kala itu, tatkala dikepung musuh, Thariq justru memerintahkan membakar kapal dengan tujuan tidak dapat melarikan diri sehingga tak ada kesempatan balik mundur dalam berjuang dan sejarah mencatat ia menang dengan hanya berjumlah 7000 pasukan.

Berkaca dari kisah Thariq, Indra berpesan agar setiap peserta memperdalam program MDRR

”

**ADIK-ADIK AKAN DIAJAK UNTUK MERASAKAN SECARA LANGSUNG AKTIVITAS DI DPR, DAPAT MELIHAT DAN MEMAHAMI SECARA LEBIH KOMPREHENSIF BAGAIMANA KERJA-KERJA POLITIK YANG DILAKSANAKAN OLEH SELURUH ANGGOTA DPR DALAM MEMPRESENTASIKAN FUNGSIYANYA YAITU WAKIL RAKYAT.**

DPR RI sebagai sebuah gelanggang untuk tumbuh dan berkembang. Indra percaya, dari MDRR DPR RI Batch ke-4 ini nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Indra sangat meyakini diantara angkatan MDRR DPR RI Batch ke tersebut nantinya bukan hanya akan melahirkan Kepala-Kepala Dinas, namun juga bisa menjadi Walikota, menjadi Bupati, menjadi Gubernur menjadi Anggota DPR bahkan tak tertutup cita-cita menjadi Presiden.

— pun/aha



FOTO: GER/ PDT

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat pidato pembukaan Program MDRR DPR RI Batch ke-4 yang digelar daring dari Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Pentingnya Penguatan Setjen DPR untuk Dukong Kegiatan Dewan

**K**etua Badan Urusan Rumah Tangga (BRUT) DPR RI Agung Budi Santoso tekankan pentingnya menambah jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk meningkatkan kinerja pendukung lembaga legislatif tersebut. Ia menilai saat ini Setjen kekurangan jumlah pegawai ASN sebanyak 300 dan Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 700.

”

**APAKAH KITA HANYA MELAKUKAN KEGIATAN BERULANG-ULANG SEPERTI ITU SAJA UNTUK MENJADI LEMBAGA LEGISLATIF YANG DICINTAI MASYARAKAT? TENTUNYA TIDAK KITA HARUS MELAKUKAN INOVASI-INOVASI AGAR DPR RI INI SEMAKIN DIPERCAYA APALAGI TAHUN INI MERUPAKAN AKHIR DARI MASA ANGGOTA 2019 HINGGA 2024.**

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BRUT) DPR RI Agung Budi Santoso.

“Laporan dari Deputi Administrasi Setjen kekurangan ASN sebanyak 300 dan TSP sebanyak 700 seperti kita tahu untuk menuju lembaga pendukung kegiatan dewan menjadi lebih baik harus dimulai dengan penambahan jumlah pegawai,” kata Politisi Partai Demokrat yang kerap disapa ABS ini.

Dalam Acara Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penetapan Prolegnas tahun 2024 dan diseminasi pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. ABS menambahkan tahun 2024 merupakan periode terakhir dari masa Keanggotaan 2019-2024.

“Apakah kita hanya melakukan kegiatan berulang-ulang seperti itu saja untuk menjadi Lembaga Legislatif yang dicintai masyarakat? Tentunya tidak kita harus melakukan inovasi-inovasi agar DPR RI ini semakin dipercaya apalagi tahun ini merupakan akhir dari masa Anggota 2019 hingga 2024,” imbuhnya.

ABS meminta Setjen DPR RI sebagai supporting system bagi kegiatan kedewanan harus diperkuat. Menurutnya jika sistem pendukungnya lemah maka akan berpengaruh kepada kegiatan legislatif yang ada di lingkungan DPR RI. “Setjen sebagai tenaga pendukung harus diperkuat dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya,” tutup ABS. **tn/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: FHN/PDT

FOTO: FHN/PDT

# Momentum Isra Mi'raj, Mari Tingkatkan Kualitas Ibadah & Kepedulian Sosial

**K**etua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Pahlevi mengungkapkan tema Isra Mi'raj yang diusung oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baiturrahman sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat luas.

"Tema yang diusung oleh DKM Baiturrahman dalam Isra Mi'raj kali ini yakni 'Isra Mi'raj Momentum Meningkatkan Kualitas Ibadah dan Peduli Sosial' sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat.

”

**KAMI, UPZ BERSAMA DKM BAITURRAHMAN DPR RI DAN KORPRI TENTUNYA, JUGA BERENCANA AKAN MEMBANGUN RUMAH QUR'AN BAITURRAHMAN.**

Melalui Isra Mi'raj diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah, juga meningkatkan minat para Muzakki untuk menyumbangkan zakatnya kepada yang membutuhkan," ujar Indra dalam peringatan Isra Mi'raj yang digelar di Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2).

Selain itu Indra yang juga sebagai Kepala Biro Pemberitaan Parlemen menambahkan, bahwa pihaknya telah menyalurkan zakat yang dipercayakan para Muzakki kepada UPZ Sekjen DPR RI ini ke yatim piatu, fakir miskin dan para mustahik lainnya. Baik yang berada di dalam lingkungan DPR RI maupun di luar atau sekitar DPR.

"Kami, UPZ bersama DKM Baiturrahman DPR RI dan KORPRI tentunya, juga berencana akan membangun Rumah Qur'an Baiturrahman. Bahkan kami juga berencana akan membuat program pemberdayaan umat lainnya, seperti permodalan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tentunya semua itu harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Sehingga dana, zakat yang diberikan umat melalui kami benar-benar tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran," paparnya.

Sementara itu, Ketua DKM Masjid Baiturrahman Suratna menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memang menyarankan bagi para Muzakki yang ingin memberikan zakatnya untuk menyalurkannya melalui UPZ Baiturrahman. Sehingga pengelolaan dan penyalurannya lebih jelas.

— ayu,kai/aha



FOTO: JKA/PDT

Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Indra Pahlevi dalam peringatan Isra Mi'raj yang digelar di Masjid Baiturrahman DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# UU KPK dan UU KUHAP Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

**D**PR RI menilai bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Terkait perkara pidana koneksitas, maka masing-masing instansi yang terlibat dalam penyidikan bukan untuk saling melemahkan, melainkan saling bersinergi melalui peran yang ditetapkan.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman saat menyampaikan keterangan DPR dalam agenda sidang tentang Pengujian Materiil UU KPK dan KUHP di Ruang Sidang Mahkamah

Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/2). Jika terjadi perbedaan penetapan pengadilan, maka perlu dilakukan musyawarah.

"Untuk menetapkan, apakah (perkara tersebut) akan diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum maka, sesuai Pasal 89 Ayat 2 KUHP, diadakan penelitian bersama

”

**SELAIN ITU, TELAH TERDAPAT MOU ANTARA KPK DENGAN TNI TERKAIT MEKANISME BAGI KPK JIKA PELAKUNYA DARI KALANGAN PRAJURIT TNI AKTIF.**

oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut," tutur Habiburrokhman.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa KPK berwenang untuk dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi termasuk yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan militer. Hal tersebut, ungkapnya, telah diatur dalam perundang-undangan sudah secara jelas dalam UU KPK.

"Selain itu, telah terdapat MoU antara KPK dengan TNI terkait mekanisme bagi KPK jika pelakunya dari kalangan prajurit TNI aktif. Hal tersebut menunjukkan telah adanya komitmen antara KPK dengan TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi," pungkasnya. — ts/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman saat menyampaikan keterangan DPR dalam agenda sidang tentang Pengujian Materiil UU KPK dan KUHP di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

FOTO: AFR/PDI

# Kampus dan BK Bekerja Sama Menuju Parlemen Modern

**B**adan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyelenggarakan rapat koordinasi terkait Rencana Pembangunan Integrasi Data BK Setjen DPR dengan Perguruan Tinggi. Ketua Tim Integrasi Data Ari Mulianta Ginting menjelaskan BKD sudah melakukan kerja sama dengan 72 perguruan tinggi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Setelah MoU tahapan selanjutnya adalah integrasi data, artinya BKD ini memfasilitasi kampus dan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama. "Ada draf RUU tentang penyiaran maka kampus bisa

melakukan satu kajian atau telaah, bisa langsung dikirimkan kepada kami secara langsung. Atau kampus bisa mengakses draf yang sedang disusun. Antara kampus dan BKD bisa bekerja sama secara langsung menuju parlemen yang modern," papar Ari di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Senayan Jakarta, Senin (12/2).

Menurut Plh Kepla Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara BK Setjen DPR RI

ini, pihak kampus bisa langsung mengakses dan melihat bahan, serta bisa memonitoring apa yang dilakukan BKD selama ini. Selain itu yang terpenting jika perguruan tinggi atau kampus punya hasil riset dan telaahan atas undang-undang atau isu di DPR yang sedang berkembang bisa langsung memberikan tanggapan dan masukan Kepada Badan Keahlian secara langsung.

"Ada komunikasi dua arah antara kampus dan BKD DPR RI. Kita harus menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk kalangan kampus. Menyerap aspirasi bukan hanya kunjungan kerja ke daerah tapi bisa juga secara langsung berkomunikasi secara digital," jelas Ari.

Menurutnya salah satu langkah menuju parlemen moderen, indikasinya adalah dengan memanfaatkan teknologi melalui integrasi data. Setelah melakukan MoU dengan 72 kampus tindak lanjut yang dilakukan adalah kampus diberikan akses ke Badan Keahlian, kampus bisa memberikan masukan pada produk-produk BKD yang berupa draf undang-undang.

ssb/aha

Ketua Tim Integrasi Data Ari Mulianta Ginting saat rapat koordinasi Badan Keahlian Setjen DPR RI di Ruang Command Center, Senin (12/2/2024).



FOTO: JKA/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Perkuat Manajemen Risiko, Inspektorat Utama DPR Gelar Rakorwas

**D**alam rangka mendukung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai *support system* kedewanan yang profesional dan modern serta berintegritas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menekankan harus ada penyusunan yang berbasis manajemen risiko oleh Inspektorat Utama melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang fokus pada mitigasi risiko.

"Semua program kegiatan memang sudah digariskan harus berbasis manajemen risiko, jadi harus ada penyusunan manajemen risiko. Jadi saya kira semua kegiatan di DPR ini kan penuh dengan berbagai risiko dalam penyelenggaraannya, sehingga Rakorwas ini menjadi sangat penting," ujarnya usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan 'Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024', di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Dalam menjalankan keseluruhan kinerja tersebut, Indra mengingatkan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI yang harus mulai berparadigma dengan lebih mengutamakan aspek kemitraan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Utama menjalankan pengawasan.

Diantaranya, yakni dengan saling memberikan masukan dan saling berdiskusi. Dengan demikian, Indra berharap kedepannya Inspektorat Utama tidak perlu lagi dianggap sesuatu yang menjadi 'momok' buat teman-teman pengelola kegiatan di Sekretariat

”

**JADI SAYA KIRA SEMUA KEGIATAN DI DPR INI KAN PENUH DENGAN BERBAGAI RISIKO DALAM PENYELENGGARAANNYA, SEHINGGA RAKORWAS INI MENJADI SANGAT PENTING.**

Jenderal DPR RI sehingga tidak ada jarak dalam kemitraan dengan para auditi atau pengelola kegiatan-kegiatan yang ada di Setjen DPR RI.

Sebelumnya saat pidato pembukaan, Indra mengingatkan Inspektorat Utama untuk secara strategis harus dapat memberikan masukan atau input yang konstruktif kepada Setjen DPR RI. Tak hanya basis manajemen resiko, ungkap Indra, namun juga tata kelola dan penguatan pengendalian sehingga program dapat terlaksana efisien dan tepat guna.

**pun/aha**

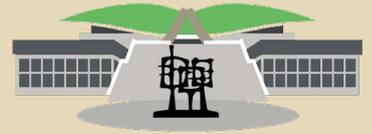


Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar usai membuka Rapat Koordinasi Pengawasan 'Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024', di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: IHN/PTI



**Gathering Televisi dan Radio  
Parlemen dengan tema  
"Memperkuat Kohensivitas Tim  
Kerja TVR Parlemen Sebagai  
Media Referensi Indonesia" di  
Yogyakarta, Jumat (16/2/2024).**

FOTO: PRIMA

